

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan manajemen laba, antara lain:

a. Rifky (2013)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba” yang meneliti perusahaan manufaktur di BEI selama periode tahun 2009 sampai tahun 2012, menyimpulkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa memang terjadi manajemen laba dengan tujuan menghindari pelaporan kerugian pada perusahaan - perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2012. Namun penelitian ini tidak menemukan adanya manajemen laba dengan tujuan menghindari pelaporan penurunan laba. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Begitupun dengan Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

b. Anasta (2015)

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Beban Pajak Tangguhan dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba” yang meneliti pada perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014, menyimpulkan bahwa secara parsial beban pajak

tanggungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan aktiva pajak tanggungan dan tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan secara simultan aktiva pajak tanggungan, beban pajak tanggungan dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

c. Yulianti (2015)

Penelitian yang berjudul "Kemampuan Beban Pajak Tanggungan dalam Mendeteksi Manajemen Laba" yang meneliti perusahaan yang terdaftar di BEJ selama periode tahun 2010 sampai tahun 2013, menyimpulkan bahwa beban pajak tanggungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Penggunaan beban pajak tanggungan sebagai pengukur manajemen laba secara umum masih diragukan.

d. Ifada dan Wulandari (2016)

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 – 2013. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya manajemen laba, sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan praktik manajemen laba.

e. Fitriany (2016)

Fitriany meneliti tentang pengaruh aset pajak tanggungan, beban pajak tanggungan akrual terhadap manajemen laba. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear biner dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) aset pajak tanggungan, beban pajak

tanggungan dan akrual mampu menjelaskan manajemen laba sebesar 59.2%, (2) berdasarkan uji Wald variabel asset pajak tanggungan dan akrual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tanggungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, (3) asset pajak tanggungan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba, (4) beban pajak tanggungan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (5) akrual terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba.

f. Astutuik (2016)

Astutik (2016) melakukan analisis tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang *food and beverages* di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga sampel yang didapat sebanyak 10 perusahaan. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang mengindikasikan model penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan masing-masing mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

g. Amilia (2017)

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *deferred tax asset, deferred tax expense, dan diskresioner akrual* terhadap *earnings management* (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016)". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (*earnings management*). Beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba (*earnings management*). Diskresioner akrual berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba (*earnings management*).

Selanjutnya, referensi dari jurnal internasional yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan manajemen laba, antara lain:

a. Erwati, dkk (2013)

Erwati, dkk melakukan penelitian bertujuan untuk membuktikan secara empiris kemampuan beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan dan akrual dalam memprediksi praktik manajemen laba. Metode analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif dan uji hipotesis dengan regresi logistic. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan dan akrual tidak mampu memprediksi praktik manajemen laba.

b. Budiarti (2013)

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kemampuan bebanpajak tangguhan dalam mendeteksi labamanajemen di perusahaan manufaktur. Penelitian ini tidak menggunakan dasar akrual seperti itupenelitian telah dilakukan sebelumnya karena metode akrual telahterbukti tidak terbiasaprediksi manajemen laba. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan menufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada 2009-2011. Hasil daripengujian hipotesis yang telah dilakukan menerima hipotesis yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhantidak signifikan dalam mendeteksi kegiatan manajemen yang menunjukkan bahwa pajak tangguhanbiaya tidak dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba.

c. Amanda dan Meiriska (2015)

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Basis AkruaI Terhadap Manajemen Laba”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak kini, beban pajak tangguhan, dandasar akruaI menuju manajemen laba. Objek penelitian ini adalah manufaktur perusahaan di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011-2013. Hasil dari penelitian ini adalah (1) beban pajak kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (2) beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (3) basis akruaI tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (4) beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan basis akruaI secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

d. Timuriana dan Muhammad (2015)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Menurut mereka laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada investor sehingga mencerminkan aktivitas perusahaan. kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Adanya perbedaan kepentingan dan informasi tersebut memacu manajemen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan manajemen untuk mempengaruhi angka - angka akuntansi tersebut dapat berupa manajemen laba melalui aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Metode pengolahan data yaitu dengan analisis deskriptif statistik dengan alat analisis yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba, (2) Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan (3) Aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

e. Sumbari, dkk (2017)

Selanjutnya referensi jurnal internasional yang terakhir dilakukan oleh Sumbari, Murni dan Masri (2017). Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur, industri kimia dan berbagai industri perusahaan *manufacturing* yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (BEI) dengan periode observasi antara 2013 dan 2015. Sampling metode yang digunakan *purposive sampling* dan analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif, dan signifikan manajemen laba dengan tujuan penurunan laba sedangkan akrual berpengaruh positif dan signifikan berdampak pada perusahaan dalam manajemen laba untuk meningkatkan laba.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Theory Agency*)

Teori keagenan yang lahir sekitar tahun 1970an, berawal dari adanya bentuk korporasi yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan perusahaan dengan kontrol atau dengan kata lain ada pemisahan yang jelas antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Semakin rumit dan besarnya suatu perusahaan membuat pihak pemilik tidak bisa secara intensif mengelola perusahaan yang sehingga meminta pihak manajemen untuk mengelola kelangsungan hidup perusahaan dalam usahanya dapat mendapatkan profit. Selanjutnya manajemen sebagai agen dan pemilik dianggap sebagai *principal*. Hubungan tersebut banyak ahli disebut dengan hubungan keagenan.

Teori keagenan ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak, di mana pihak *principal* yang terdiri dari satu atau lebih orang mengikat perjanjian dengan pihak agen untuk melaksanakan sejumlah jasa nama *Prinsipal* yang mencakup pendelegasian sejumlah kekuasaan untuk membuat keputusan kepada pihak agen. Hubungan tersebut memberi konsekuensi, bahwa manajemen

yang telah diberi otorisasi dalam pengambilan keputusan secara sadar harus bertindak dalam konteks yang memberi keuntungan kepada principal . Menurut Horne dan Warchowicz (1998:482) bahwa manajemen merupakan agen (wakil) dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka dalam perusahaan, sehingga perlu adanya pendelegasikan wewenang kepada agen. Menurut Scott (2015) teori keagenan merupakan versi *theory* yang memodelkan proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak yang terlibat dalam mencoba mendapatkan yang terbaik bagi dirinya. Disini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa baik agen maupun principal keduanya mencoba mendapatkan yang terbaik dengan informasi yang dimilikinya dimana agen mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pada *principal*.

Eisenhardt (1989) dalam Karina (2017) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi. Yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan.
3. Manusia selalu menghindari risiko.

Menurut Atmaja, 2013 teori agensi merupakan problem keagenan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial yang terjadi apabila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, manajemen harus diberikan insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatalan terhadap keputusan yang dapat diambil oleh manajemen. Kegiatan pengawasan pasti membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi menurut Horne dan Warchowicz (1998:482) dalam Karina (2017) adalah biaya-biaya yang

berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham. Selain itu teori ini disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan, pemegang saham dengan pemegang utang juga pemegang saham dengan manajemen. Konflik yang terjadi pada manajemen dan pemegang saham dinamakan dengan *agency conflict*.

2.2.2 Manajemen Laba (*Earning Management*)

Laba merupakan informasi dalam laporan keuangan yang menjadi dasar pembuatan keputusan para pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham. Para pemegang saham menggunakan laba dan harga saham sebagai dasar penilaian kinerja manajer untuk membuat keputusan, seperti keputusan pemberian kompensasi bagi manajer. (Scott, 2015).

Penilaian kinerja manajer berdasarkan laba akan mendorong manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang mendukung kepentingannya. Manajer juga bisa mengambil tindakan nyata yang mengubah aliran kas untuk mempengaruhi besarnya laba. Upaya ini disebut manajemen laba.

2.2.2.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk. (2006) mendefinisikan yang dimaksud manajemen laba yaitu :

“Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut)”.

Menurut Fischer dan Rozenzweig (1995) manajemen laba adalah sebagai berikut :

“**Manajemen laba** adalah tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang”.

Definisi menurut Yulianti (2015:108), *earning management* dalam arti sempit didefinisikan perilaku manajer “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya earnings. Sedangkan dalam arti luas *earnings management* didefinisikan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) probabilitas ekonomis jangka panjang.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya.

Manajemen laba yang bisa dilakukan dengan berbagai cara ini tentu memiliki tujuan. Healy dan Wahlen (1999) menyebutkan tujuan dari manajemen laba dalam definisinya, yaitu :

“Earnings management occurs when managers use judgement in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers”.

Manajemen laba dilakukan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan dan hasil perjanjian kontrak yang didasarkan pada besarnya laba. Salah satu pemangku kepentingan tersebut adalah para pemegang saham terkait keputusan pemberian kompensasi bagi manajer.

Dalam definisi manajemen laba yang diungkapkan oleh Schipper (1989) disebutkan bahwa manajemen laba dilakukan untuk memenuhi tujuan pribadi. Ketika laba menjadi indikator pengukuran kinerja manajer serta menjadi dasar pemberian bonus bagi manajer, manajemen laba bisa dimanfaatkan manajer untuk keuntungannya sendiri.

Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba biasanya memiliki batas minimal dan batas maksimal pemberian bonus. Menurut Scott (2015), ketika besarnya laba tidak mencapai batas minimal, manajer tidak akan menerima bonus. Ketika besarnya laba melebihi batas minimal, manajer akan menerima bonus. Besarnya bonus akan meningkat hingga mencapai batas maksimal. Ketika batas maksimal terlewati, besarnya bonus tidak akan meningkat lagi.

Manajer akan berusaha memaksimalkan besarnya laba hingga mencapai batas maksimal pemberian bonus berdasarkan laba tersebut. Ketika besarnya laba jauh di atas batas maksimal pemberian bonus, manajer akan meminimalkan labanya sehingga manajer tetap mendapatkan bonus dalam jumlah maksimal dan di saat yang sama, manajer bisa menyimpan laba untuk periode mendatang ketika besarnya laba dibawah batas pemberian bonus.

Manajemen laba juga dilakukan untuk mempengaruhi hasil kontrak yang didasarkan pada laba. Salah satu contohnya adalah kontrak pemberian pinjaman oleh kreditur. Kontrak perjanjian pinjaman dengan kreditur biasanya memiliki syarat-syarat yang didasarkan pada angka akuntansi, termasuk besarnya laba. Ketika perusahaan berada di ambang batas pelanggaran perjanjian kontrak, manajer akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba demi menghindari biaya yang ditimbulkan jika perjanjian tersebut dilanggar.

Manajemen laba bisa legal dan bisa ilegal. (Sulistiyawan *et al.*2011). Manajemen laba yang dilakukan sejauh yang diperbolehkan standar akuntansi yang berlaku merupakan manajemen laba yang legal. Sebaliknya, praktik manajemen laba yang melanggar standar akuntansi yang berlaku merupakan manajemen laba yang ilegal.

2.2.2.2 Motivasi Manajemen Laba

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2014:131) mencatat ada 3 (tiga) motivasi yang dapat memicu manajer melakukan manajemen laba. Ketiga motivasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Insentif Perjanjian.
2. Dampak Harga Saham.
3. Intensitas Lain.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi manajemen laba sebagai berikut:

1. Insentif Perjanjian

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba bersih rendah dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meingkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah terkait dengan batas atas dan bawah ini. Jika laba yang belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat cadangan untuk bonus masa depan.

2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan. Manajer juga dapat melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal

3. Insentif Lain

Terdapat beberapa alasan manajemen laba lainnya. Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah misalnya untuk ketaatan undang-undang antimonopoly.

Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan - persaingan. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan permintaan serikat buruh.

2.2.2.3 Teknik Manajemen Laba

Manajer bisa terlibat dalam berbagai teknik manajemen laba. Teknik Manajemen Laba menurut Scott (2015) :

(1) *Taking a bath*

Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organizational stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola ini juga terjadi pada periode dimana CEO baru menjabat karena CEO baru tersebut tidak mau disalahkan atas kinerja buruk CEO sebelumnya. (Scott, 2015). Pola *Taking a bath* atau *big bath* adalah praktik manajemen laba dengan menghapus aset-aset yang akan menimbulkan biaya di masa depan.

Pembalikan akrual akan meningkatkan kemungkinan laba yang dilaporkan di masa depan, dengan kata lain menyimpan cadangan laba untuk masa depan. Cadangan laba ini bisa dimanfaatkan beberapa waktu kemudian ketika pengawasan dewan terhadap manajemen laba agresif sudah berkurang dan hak opsi sudah bisa digunakan. Pemanfaatan cadangan laba pada periode ini akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh CEO.

(2) *Income minimization*

Manajemen laba dilakukan dengan penghapusan aset kapital dan aset tak berwujud, serta membebankan pengeluaran R&D. Salah satu pertimbangan dalam menurunkan laba adalah peraturan pajak dan motivasi politis.

Menurut Hu *et al.*(2015) manajer cenderung konservatif di awal masa jabatannya. Upaya untuk meminimalkan laba ini bisa dilakukan CEO diawal masa jabatannya untuk menyimpan cadangan laba. Cadangan laba ini bisa dimanfaatkan CEO ketika memasuki periode dimana pengawasan dewan terhadap manajemen laba agresif sudah berkurang serta hak opsi sudah bisa digunakan. Praktik ini akan memaksimalkan keuntungan yang diperoleh CEO.

(3) *Income Maximation*

Praktik manajemen laba ini biasanya dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus dan menghindari risiko pelanggaran perjanjian utang. Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba akan mendorong manajer untuk memaksimalkan laba. Salah satu upaya untuk memaksimalkan laba tersebut adalah dengan memanfaatkan praktik manajemen laba.

Praktik manajemen laba ini dimanfaatkan CEO beberapa waktu setelah menjabat, yaitu ketika pengawasan dewan terhadap manajemen laba agresif sudah berkurang, kemampuan manajer sudah semakin terasah melalui pengalaman, dan hak opsi sudah bisa digunakan seperti yang dikemukakan oleh Hu *et al.* (2015). Periode penggunaan hak opsi ini merupakan periode dimana masa tunggu atau *vesting period* sudah terlewati.

(4) *Income Smoothing*

Ada berbagai alasan yang mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba ini. Dilihat dari segi kompensasi, manajer yang tidak menyukai risiko mungkin melakukan *income smoothing* untuk mendapatkan kompensasi yang relatif konstan. Dilihat dari segi perjanjian utang, *income smoothing* dilakukan untuk mengurangi ketidakstabilan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi kemungkinan pelanggaran terhadap perjanjian utang.

Manajer juga melakukan *income smoothing* untuk mengurangi risiko dipecat karena *income smoothing* mengurangi kemungkinan laba yang dilaporkan rendah. Terakhir, *income smoothing* dilakukan untuk menyampaikan kekuatan *earnings persistence* kepada pasar.

2.2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Watts and Zimmerman (1986), secara empiris membuktikan bahwa hubungan prinsipal dan agen sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingan. salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah manajemen laba (Maruf, 2006). Menurut Scott (2003) terdapat berbagai motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Other Contractual Motivations

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk perjanjian hutang (*debts covenants*).

2. To Communicate Information To investors

Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan membandingkan laba.

3. Political Motivations

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan laba.

4. Taxation Motivations

Manajemen laba dilakukan untuk tujuan penghematan pajak, yaitu dengan cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.

5. *Changes of Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan *income maximation* untuk meningkatkan bonus mereka.

6. *Initial Public Offerings (IPO)*

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), cenderung melakukan *income increasing* untuk menarik calon investor.

2.2.2.5 Implikasi Manajemen Laba Terhadap Laporan Keuangan

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh Dewi Yanti (2014:135) sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen laba, seorang analisis harus memeriksa hal berikut:

1. Insentif melakukan, manajemen laba
Manajemen laba tidak dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah dibahas sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkan insentif tersebut.
2. Reputasi dan masa lalu manajemen
Perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu, persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini.
3. Pola yang konsisten.
Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti *debt to equity* atau *interest coverage*. Perlu diverifikasi apakah komponen laba (atau neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu.
4. Kesempatan melakukan manajemen laba
Sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat aktivitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup

banyak untuk menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

2.2.3 Konsep Akuntansi Akrua

Dalam Akuntansi dikenal dengan istilah basis akrual dan basis kas. Pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akrua adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang.

Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas (Elingga, 2015:52). Akrua tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan pendekatan ini, mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas.

Menurut PSAK (2017), laporan keuangan disusun berdasarkan akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Oleh sebab itu, upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini digunakan dan diakui secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual.

Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan.

Total akrual terdiri dari dua komponen yaitu *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sementara itu, *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.

Perekayasa menaikkan atau menurunkan akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasa laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba atau *earnings management* melalui perekayasa akrual. *Discretionary Accrual* dapat dilakukan melalui kebijakan pemilihan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual namun bersifat subjek dan kontekstual, salah satu contoh dengan cara memperbesar atau memperkecil pencadangan aktiva pajak tangguhan dengan pertimbangan laba yang akan datang dapat menutup atau tidak menutup terpulihkannya aktiva pajak tangguhan.

2.2.4 Akuntansi Pajak Tangguhan

Antara akuntansi pajak dan keuangan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan pengakuan penghasilan serta biaya. Karena dasar pengenaan penghasilan dan biaya untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan berbeda dengan basis penghitungan untuk keperluan komersial maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya beda tetap dan sementara. Beda tetap, yaitu perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Beda tetap tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan.

Sedangkan beda sementara sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Akuntansi Pajak Tangguhan di Indonesia, akuntansi Pajak Penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat:

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi; dan
2. Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada periode yang akan datang.

Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan pengukuran subyektif dan beban atas kememadaian suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiskal yang akan datang.

Dari paragraf tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan cadangan dengan penurunan atau kenaikan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan bisa dipengaruhi *judgment* untuk menentukan pembentukan cadangan dan

besarnya penghasilan kena pajak yang diperkirakan pada periode fiskal mendatang yang bervariasi secara signifikan tergantung pada lingkungan individual perusahaan. *Judgment* untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi yang bisa bersifat subyektif diatas memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan instrumen akun aktiva pajak tangguhan untuk beberapa motif. Oleh karena angka-angka dalam laporan keuangan dapat memberikan konsekuensi ekonomi, maka tindakan manajemen laba dapat memberikan gambaran yang tidak fair atas laporan keuangan (Scott, 2000).

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa potensi manajemen laba dapat terjadi dalam menentukan dan mengubah penilaian aktiva pajak tangguhan yang tercermin dalam kenaikan atau penurunan aktiva pajak tangguhan sebagai cadangan, oleh karena itu perlu diperoleh bukti empiris bagaimana perusahaan publik mengimplementasikan PSAK No 46 dan sebuah pedoman yang diperoleh dari fakta empiris variabel-variabel apa yang seharusnya dipertimbangkan dalam melakukan estimasi beban pajak tangguhan yang memadai sesuai dengan yang diamanahkan dalam PSAK No 46.

PSAK No. 46 sebagai standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur akuntansi tentang pajak penghasilan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan komponen-komponen penting dari aset dan kewajiban pajak tangguhan pada catatan laporan keuangan mereka. Penelitian ini memfokuskan penggunaan informasi-informasi *hand-collected* tersebut untuk menguji komponen-komponen apa saja dari kewajiban pajak tangguhan bersih yang menggambarkan manajemen laba menghindari kerugian.

2.2.5 Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo

kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang (IAI, 2013). Besaran aktiva pajak tangguhan dicatat bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang. Aset pajak tangguhan tidak dapat diakui jika timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi yang dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak (IAI, 2013). Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan.

Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar. Apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar di masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai suatu kewajiban. Dan, apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu aset. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Apabila penghasilan sebelum pajak (komersil) lebih besar dari penghasilan kena pajak (fiskal) akan mengakibatkan beban pajak komersil lebih besar dari pajak terhutang / pajak kini (*taxpayable*). Dari hal tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Kewajiban ini dapat dihitung dengan mengalikan jumlah perbedaan temporer dengan tarif pajak.

2. Apabila penghasilan sebelum pajak (komersil) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (fiskal) akan mengakibatkan beban pajak komersil lebih kecil dari pajak terhutang.

2.2.6 Beban Pajak Tangguhan

Menurut Harnanto (2014:115), beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Penyebab perbedaan antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14) dalam Sukmawati (2015), dapat dikategorikan dalam dua kelompok:

1. Perbedaan Permanen atau Tetap Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara permanen.
2. Perbedaan Temporer atau Waktu Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:
 - a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
 - b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.

- c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.
- d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) dalam Sukmawati (2015) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

- a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan *joint venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.
- b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal *goodwill* yang berasal dari penggabungan usaha.
- c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*), menghasilkan laba akuntansi yang lebih

informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya. Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan komponen yang bersifat transitori (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut). Dengan kesadaran tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi hanyalah akibat dari pengakuan konsekuensi pajak karena adanya perbedaan temporer nilai tercatat aktiva dan kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

2.2.7 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Semakin besar pajak yang ditanggung, maka semakin kecil laba yang didapatkan perusahaan sehingga timbul kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara eufimisme ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2003:2) dalam Ningsih (2017).

2.2.7.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar (2013:18) adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah *minimum*.”

Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah:

“*Tax planning* (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari

bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.”

Menurut Larry *et al.* (1994) dalam Safitri (2017) adalah sebagai berikut :

“*Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current in future tax periods* (Perencanaan pajak adalah analisis sistematis dari perbedaan pilihan pajak ditujukan untuk meminimalkan kewajiban pajak dimasa saat ini dan masa depan).”

Lyons Susan M. (1996) dalam Safitri (2017) mendefinisikan tax planning sebagai berikut :

“*Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability* (Perencanaan pajak adalah pengaturan dari orang bisnis dan / atau urusan pribadi untuk meminimalkan kewajiban pajak).”

Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib berusaha mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Fitriany, 2016).

Dari beberapa definisi di atas pada intinya perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah aturan yang ada, tetapi tidak secara eksplisit melawan undang-undang, dan tidak dapat dipersalahkan sebagai upaya penggelapan pajak.

2.2.7.2 Tujuan dan Jenis – Jenis Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22. Dan pasal 23).

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2008:109) dalam Safitri (2017) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Nasional (*national tax planning*).
2. Perencanaan Pajak Internasional (*international tax planning*).

Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memerhatikan undang-undang domestik, tetapi perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memerhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

2.2.7.3 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008:10) dalam Safitri (2017) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*).
2. Undang- undang perpajakan (*tax law*).
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan ketiga motivasi perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

a. Jenis pajak yang akan dipungut

Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai, seperti:

1. Pajak penghasilan badan dan orang pribadi.
2. Pajak atas keuntungan modal.
3. *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain.
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
5. Pajak atas undian/hadiah.
6. Bea materai.
7. *Capital transfer taxes/transfer duties*.
8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.

b. Subjek pajak

Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan (*retained earning*) bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

c. Objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan (*tax bases*) besarnya pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

d. Tarif pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*). Barry Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy (2008:12):

“The heavier the burden, the stronger the motive, and the wider the scope for tax avoidance since the tax payer may avoid the higher rates of tax while still remaining liable to the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah).”

e. Prosedur pembayaran

Sistem *self-assesment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik.

2. Undang-undang Perpajakan

Peraturan perundang-undang diikut oleh ketentuan-ketentuan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Akibatnya terbukan celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:

1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
2. Tentukan situasi sekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan.

2.2.7.4 Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak dalam Penyajian Laporan Keuangan

Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tresnajaya dan Rusdin, 2004) dalam Safitri (2017).

Upaya-upaya yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan melakukan *tax planning*. Sinyalemen di atas yang *mendasari tax planning*, sehingga *tax planning* yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat mencapai), hal-hal berikut:

1. Mengatur *cashflow* perusahaan agar pembayaran setoran pajak bulanan tidak mengganggu *cashflow* perusahaan, dan itu artinya laporan arus kas yang disajikan oleh akuntansi akan semakin baik.
2. Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada perhitungan SPT PPh badan pada akhir tahun pajak.
3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaan pajak yang mengakibatkan terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang jumlahnya memberatkan perusahaan.
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat alasan di atas sangat relevan dengan diterapkannya *tax planning* dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak hanya sebatas pemberi informasi tetapi juga merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan baik tanggung jawab internal maupun tanggung jawab eksternal.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang (Fitriany,2016). Adanya peranan antara aset pajak tangguhan yang akan dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (Hakim,2015).

Ikatan Akuntansi Indonesia (2013) menjelaskan bahwa aset pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang. Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi.

Mengacu pada pernyataan dan hasil penelitian terdahulu yang ada, maka diekspektasikan adanya peranan aset pajak tangguhan yang dapat dimungkinkan mampu digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba. Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*), untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut

H₁ : Aset Pajak Tangguhan mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.

2.3.2 Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Pelaporan beban pajak penghasilan yang mencakup pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*), menghasilkan laba akuntansi yang lebih informatif dan dapat mencerminkan kinerja perusahaan sebenarnya. Investor menyadari bahwa penghasilan atau beban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi merupakan hasil dari akuntansi akrual dan merupakan komponen yang bersifat *transitori* (peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dan hanya berpengaruh pada periode terjadinya peristiwa tersebut). Dengan kesadaran tersebut, investor akan memahami bahwa kenaikan atau penurunan laba akuntansi hanyalah akibat dari pengakuan konsekuensi pajak karena adanya perbedaan temporer nilai tercatat aktiva dan kewajiban berdasarkan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Tundjung (2015), Ifada dan Wulandari (2016) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut Tundjung (2015) menyatakan bahwa kesalahan dalam model akrual untuk mengindikasikan manajemen laba dapat dikurangi dengan memfokuskan pada beban pajak tangguhan. Dalam penelitian tersebut digunakan model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba.

Berdasarkan pada temuan-temuan diatas maka diekspektasi peranan yang signifikan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba (*earning management*). Manajemen laba dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah beban yang diakui dalam laporan laba rugi, untuk itu dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Beban Pajak Tangguhan mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.

2.3.3 Akruwal Terhadap Manajemen Laba

Muljono (2009) dalam Risma (2016) mengemukakan bahwa akruwal adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terhutang. Teknik akuntansi berbasis akruwal diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekuitas. Akruwal tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dasar akruwal umumnya memberikan indikasi yang lebih baik dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan (IAI 2013). Namun konsep akruwal tersebut memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk rekayasa angka- angka dalam laporan keuangan, sehingga dapat digunakan untuk mengubah angka laba yang dihasilkan apabila standar akuntansi memungkinkan.

Menurut penelitian yang dilakukan Fitriany (2016 dan Masri *et,al* (2017) yang menyatakan bahwa akruwal berpengaruh terhadap manajemen laba. Masri *et,al* (2017) menyatakan bahwa akruwal tidak tergantung kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dilunasi. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Berdasarkan pada temuan diatas, maka diekspektasikan adanya peranan akruwal yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

H₃ : Akruwal mampu memprediksi indikasi praktik Manajemen Laba.

2.3.4 Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Hubungan antara perencanaan pajak dengan manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif yang telah dibahas dalam teori manajemen laba. Dalam Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Einsenhart dalam Darmawati, dkk, 2004), yakni : (1) masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari principal dan agent berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi principal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agent; (2) masalah pembagian resiko yang timbul pada saat principal dan agent memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Einsenhart (dalam Darmawati, dkk, 2004) menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai sifat dasar manusia yakni : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi manusia mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Ketiga sifat tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reabilitasnya dan informasi yang disampaikan biasanya diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau *assymerty informationt* (Ujiyantho & Pramuka, 2007), sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba.

Perencanaan pajak dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pembayaran pajaknya sepanjang masih dalam aturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pajak dengan baik berdampak pada penurunan laba melalui kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada uraian diatas mengacu pada pernyataan tersebut, maka diekspektasikan adanya peranan perencanaan pajak yang dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

H₄ : Perencanaan Pajak mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menyatakan dugaan sementara atau jawaban sementara suatu masalah atau pertanyaan penelitian mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuan hipotesis adalah untuk menguji kebenaran dugaan dan harus didasarkan atas sesuatu dasar pemikiran pada teori yang ada, sehingga dugaan tersebut benar, dalam penelitian ini penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H1: Aset pajak tangguhan mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.

H2: Beban pajak tangguhan mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.

H3: AkruaI mampu memprediksi indikasi praktik Manajemen Laba.

H4 : Perencanaan Pajak mampu memprediksi praktik Manajemen Laba.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

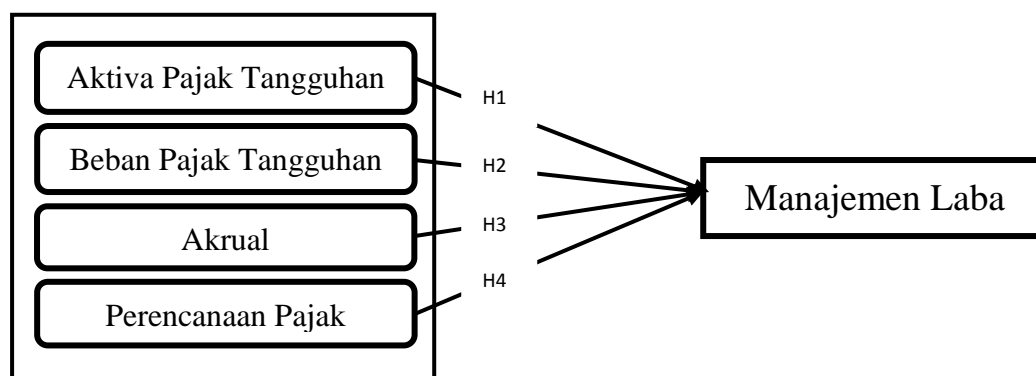
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan.

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, akruaI dan perencanaan pajak. Oleh karena itu, keempat hal tersebut merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Dalam hal ini, terdapat suatu indikasi manajemen melakukan manajemen laba dalam proses perencanaan pajak. Begitupun aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Ketika semakin besar perbedaan antara laba fiskal dan akuntansi menunjukkan semakin besarnya direksi manajemen. Artinya, semakin tinggi praktik manajemen laba, maka semakin tinggi pula aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan.

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, akrual dan perencanaan pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian